

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode survey. Penelitian akan menggunakan sampel sebagai fokus penelitian untuk membuktikan hipotesis, karena itu pokok kegiatannya adalah mengambil sampel dari populasi anggota DPRD Kabupaten Pringsewu

3.2 Sumber Data

Data yang dihasilkan oleh peneliti merupakan hasil akhir dari proses pengolahan selama berlangsungnya penelitian. Sumber data menurut cara memperolehnya, antara lain:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. (Wiratna Sujarweni 2015:39). Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jenis data yang digunakan adalah data dari hasil jawaban kuesioner yang dibagikan kepada anggota DPRD Kabupaten Pringsewu untuk variabel *personal background*, variabel *political background*, variabel akuntabilitas, variabel transparansi, variabel partisipasi masyarakat, variabel komitmen organisasi, variabel pengetahuan anggaran, variabel pemahaman terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur, dan variabel pengawasan keuangan daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, artikel, buku – buku sebagai teori dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak

perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. (Wiratna Sujarweni 2015:39).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan dalam pengumpulan data menurut Sugiono (2014:107) melalui wawancara, angket dan observasi:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau keyakinan *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tau apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data, pengumpulan data berdasarkan komunikasi langsung antara peneliti dengan responden yang ada di. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert (1,2,3,4,5). Dalam skala likert, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner pilihan dimana setiap item pernyataan disediakan 5 jawaban. Dalam penentuan skor nilai, penelitian ini menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono (2014:107), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item

instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain:

- | | | | | |
|----|-----|---|---------------------|--------|
| 1. | SS | = | Sangat Setuju | Skor 5 |
| 2. | S | = | Setuju | Skor 4 |
| 3. | RR | = | Ragu-ragu | Skor 3 |
| 4. | TS | = | Tidak Setuju | Skor 2 |
| 5. | STS | = | Sangat Tidak Setuju | Skor 1 |

3. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2014:90). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Pringsewu periode 2014 – 2019 yang berjumlah 40 orang.

Sampel yang digunakan yaitu seluruh anggota dewan karena didalam UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 pasal 46 ayat 1 Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, dan Badan Kehormatan yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran. Alasan dipilihnya sampel tersebut karena seluruh anggota DPRD terlibat langsung dalam proses pembahasan, pengesahan dan pengawasan terhadap anggaran. Selain itu alasan mengapa panitia anggaran DPRD Kabupaten Pringsewu dijadikan responden

adalah untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih valid dan tidak bias. Untuk mengantisipasi rendahnya *responden rate* melakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Dalam kuesioner yang disampaikan peneliti diberikan kebebasan untuk mengisi identitas maupun tidak mengisi dalam hal ini mencakup nama responden tersebut.
2. Memberikan jaminan kerahasiaan atas jawaban yang diberikan oleh responden.

3.5 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:88) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan dua jenis variabel yang akan diteliti:

1. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel independen atau variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu *Personal background* (X_1), *Political background* (X_2), Akuntabilitas (X_3), Transparansi (X_4), Partisipasi Masyarakat (X_5), Komitmen Organisasi (X_6), Pengetahuan anggaran (X_7), dan Pemahaman Peraturan, Prosedur, kebijakan (X_8).

2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah Pengawasan Keuangan Daerah (Y).

3.6 Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Menurut Sujarweni (2015:76) memberikan pengertian tentang definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti

setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana. Adapun definisi operasional masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variable

Variabel	Operasional Variabel	Indikator
<i>Personal Background</i> (X ₁)	<i>Personal background</i> adalah latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. (Dewi, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Kelamin 2. Usia 3. Tingkat pendidikan 4. Latar Belakang pendidikan 5. Latar Belakang Pekerjaan 6. Pengalaman Organisasi
<i>Political Background</i> (X ₂)	<i>Political background</i> adalah latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. (Dewi, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman Politik 2. Pengalaman di DPRD 3. Asal Partai Politik 4. Latar Belakang Ideologi Partai Politik 5. Asal Komisi 6. Jabatan di Partai Politik 7. Jabatan di DPRD 8. Jumlah Partai yang Pernah diikuti
Akuntabilitas (X ₃)	Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota dewan mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas penyusunan LAKIP 2. Anggota dewan menggunakan LAKIP sebagai media untuk mengetahui, menilai keberhasilan dan kegagalan tugas 3. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dapat dirasakan oleh masyarakat

		<p>4. Prinsip penyusunan LAKIP jujur, objektif dan transparan</p> <p>5. Penyampaian LAKIP dilakukan secara tertulis,</p> <p>6. Mekanisme penyampaian laporan LAKIP melibatkan pihak yang berwenang</p> <p>7. LAKIP meliputi pengungkapan mandate</p>
Transparansi (X ₄)	<p>Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Annisaningrum (2010:2),</p>	<p>1. Pemerintah daerah selalu memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran</p> <p>2. Dokumen yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang disusun dapat dengan mudah diakses masyarakat</p> <p>3. Pemerintah selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban</p> <p>4. Usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran</p> <p>5. Pemerintah daerah telah memiliki sistem informasi mengenai kebijakan anggaran</p>
Partisipasi Masyarakat (X ₅)	<p>Partisipasi masyarakat merupakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan beserta pihak eksekutif mulai pada saat penyusunan anggaran, kebijakan serta</p>	<p>1. Penyusunan arah dan kebijakan APBD melibatkan masyarakat</p> <p>2. Prioritas dan rencana mempertimbangkan saran dan kritikan masyarakat,</p> <p>3. Penyusunan APBD</p>

	<p>penentuan strategi arah dari kebijakan yang akan dijalankan. Utomo (2011:41)</p>	<p>melibatkan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Advokasi APBD selalu melibatkan masyarakat 5. Konsultasi dan konfirmasi rancangan APBD melibatkan masyarakat 6. Mengakomodasi usulan masyarakat serta adanya sistem penyampaian anggaran kepada masyarakat
<p>Komitmen organisasi (X₆)</p>	<p>Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi Pramita (2010)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota dewan merasa terikat secara emosional dengan badan legislatif 2. Badan legislative sangat berarti bagi anggota dewan, 3. Anggota dewan merasa masalah yang ada di legislatif sama seperti masalah sendiri 4. Anggota dewan mau berusaha bekerja diatas batas normal untuk mensukseskan kinerja badan legislatif 5. Anggota dewan tetap bertahan dalam legislative karena komitmen dan loyalitasnya 6. Anggota dewan bersikap professional terhadap kinerja yang dilakukannya
<p>Pengetahuan Anggaran (X₇)</p>	<p>Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran adalah pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan mengenai penyusunan APBD 2. Pengetahuan terhadap pelaksanaan APBD 3. Pengetahuan terhadap pengawasan mulai

	pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah / APBD (Dewi, 2011)	<p>dari penyusunan</p> <p>4. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi APBD</p> <p>5. Pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD</p> <p>6. Pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD.</p>
Pemahaman Peraturan, Prosedur Kebijakan (X ₈)	Pemahaman peraturan, prosedur dan kebijakan adalah yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat pemahaman anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) (Dewi, 2011)	<p>1. UU No.32 Tahun 2004</p> <p>2. UU No.33 Tahun 2004</p> <p>3. UU No.27 Tahun 2009</p> <p>4. PP No.3 Tahun 2007</p> <p>5. Pemdagri No. 8 Tahun 2009</p>
Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	Pengawasan keuangan daerah adalah segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. (Dewi, 2011)	<p>1. Keterlibatan dewan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD</p> <p>2. Pelaksanaan analisis politik terhadap penyusunan APBD</p> <p>3. Keterlibatan anggota dewan dalam pengesahan APBD,</p> <p>4. Kemampuan menjelaskan APBD,</p> <p>5. Keyakinan Anggota Dewan telah memiliki transparansi,</p> <p>6. Keterlibatan anggota dewan dalam memantau pelaksanaan APBD,</p> <p>7. Evaluasi yang</p>

		<p>dilakukan anggota dewan terhadap faktor-faktor atau alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD</p> <p>8. Permintaan keterangan oleh anggota dewan terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LPKJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota dan tindak lanjut terjadi kegagalan dalam LKPJ APBD.</p>
--	--	---

3.7 Uji Persyaratan Instrumen

3.7.1 Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pada program SPSS teknik pengujian yang sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson). Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkap. Koefisien korelasi item-item total dengan *Bivariate Pearson* dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{[n \sum i^2 - (\sum i)^2][n \sum x^2 - (\sum x)^2]}}$$

Keterangan:

r_x = Koefisien korelasi item-total (*Bivariate Pearson*)

i = Skor item

x = Skor total

n = Banyaknya subjek

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika r hitung $\geq r$ tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- Jika r hitung $< r$ tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid) Duwi Priyatno ((2010: 91)

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam SPSS uji yang sering digunakan adalah dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Rumus yang digunakan adalah:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma^2} \right]$$

Keterangan:

r_{11} = Reliabilitas instrument

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varian butir

σ^2 = Varian total

Untuk pengujian biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 0,6 kurang baik, 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8 adalah baik (reliabel). Duwi Priyatno ((2010: 98)

3.8. Uji Hipotesis

3.8.1 Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiono (2014:243) Regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen (kriterium) bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor

dimanipulasi dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila variabel independennya minimal 2. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh *Personal background* (X_1), *Political background* (X_2), Akuntabilitas (X_3), Transparansi (X_4), Partisipasi Masyarakat (X_5), Komitmen Organisasi (X_6), Pengetahuan anggaran (X_7), dan Pemahaman Peraturan, Prosedur, kebijakan (X_8) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penlitia ini, yang modelnya sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8 + e$$

Dimana :

b_0	= Konstanta
b	= Koefisien regresi model
Y	= Pengawasan Keuangan Daerah
X_1	= <i>Personal background</i>
X_2	= <i>Political background</i>
X_3	= Akuntabilitas
X_4	= Transparansi
X_5	= Partisipasi Masyarakat
X_6	= Komitmen Organisasi
X_7	= Pengetahuan anggaran
X_8	= Pemahaman Peraturan, Prosedur, kebijakan
e	= Error

3.8.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model atau yang lebih populer disebut sebagai uji F (ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan model) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian adalah, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, demikian sebaliknya. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.8.3 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Rumus t hitung pada analisis regresi adalah:

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

b_i = Koefisien variable i

S_{b_i} = Standar error variable i

Kriteria pengujian adalah, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, demikian sebaliknya.